

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem *recalling* anggota legislatif di Indonesia belum mencerminkan nilai keadilan Pancasila; serta kendala dan solusi terhadap *recalling* anggota legislatif di Indonesia yang memenuhi rasa keadilan dan nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Kesimpulan penelitian Sistem *recalling* anggota legislatif di Indonesia belum mencerminkan nilai keadilan Pancasila, khususnya sila ke empat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan/permusyawaratan, dan menghilangkan sistem Pemilu yang berdasarkan pada Proporsional Terbuka, dimana konstituen tidak memilih partai melainkan memilih calon. Kendala dalam *recalling* anggota legislatif di Indonesia mengekang anggota legislatif untuk menyuarakan pendapatnya dan upayanya untuk memenuhi tuntutan konstituennya serta bangsanya, dan menjadikan anggota legislatif bukan lagi menjadi wakil rakyat melainkan hanya sekedar petugas partai. *Recalling* anggota legislatif hendaknya dikembalikan kepada kedaulatan rakyat melalui Komisi Pemilihan Umum yang menentukan dan menetapkan anggota legislatif terpilih, apakah seorang anggota legislatif terpilih dapat di *recall* oleh partainya atau tidak, dan sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat, seharusnya dibuat regulasi mengenai ketentuan, syarat dan tata cara rakyat dari daerah pemilihan anggota legislatif terpilih untuk dapat me-*recall* anggota legislatif yang sedang mewakilinya kepada Komisi Pemilihan Umum, dan jika terjadi persengketaan antara rakyat yang me-*recall* dengan anggota yang di-*recall* ataupun partai politiknya, maka sengketa dapat dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.

Kata Kunci : *Perwujudan, Kedaulatan, Rakyat, Recall, Legislatif.*

## ***ABSTRACT***

The purpose of this study is to analyze the recalling system of legislative members in Indonesia that does not reflect the value of Pancasila justice; as well as obstacles and solutions to the recalling of legislative members in Indonesia that fulfill a sense of justice and Pancasila values. The research method used is an empirical juridical approach. Research conclusions The recalling system for legislative members in Indonesia has not reflected the value of Pancasila justice, especially the four principles of Pancasila, namely democracy led by wisdom / deliberation, and eliminating the election system based on Open Proportionality, where constituents do not choose parties but elect candidates. Obstacles in recalling legislative members in Indonesia restrain legislators from voicing their opinions and their efforts to fulfill the demands of their constituents and their nation, and make legislators no longer become representatives of the people but merely party officials. Recalling members of the legislature should be returned to the sovereignty of the people through the General Election Commission which determines and determines the elected legislative member, whether an elected legislative member can be recalled by his party or not, and as a form of people's sovereignty, regulations should be made regarding terms, conditions and procedures. people from the electoral area of elected legislative members to be able to recall the legislative members who are representing them to the General Election Commission, and if there is a dispute between the people recalling the recalled members or their political parties, the dispute can be carried out through the Constitutional Court or Supreme Court.

*Keywords* : *Embodiment, Sovereignty, People, Recall, Legislative.*